

Vol.17 No.1 Mei 2015

ISSN 1411 5492

# **GLOBAL**

## **Jurnal Politik Internasional**



Diterbitkan oleh:  
**Departemen Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS INDONESIA**  
Depok, Mei 2015

**Vol. 17 No. 1 Mei 2015**

**GLOBAL**

Jurnal Politik Internasional

***Penanggung Jawab***

KETUA DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FISIP UNIVERSITAS INDONESIA

***Pemimpin Redaksi dan Ketua Dewan Editor***

BROTO WARDOYO

***Redaktur Pelaksana***

BEGINDA TEGUH ANWAR PAKPAHAN

***Sekretaris Redaksi***

SIGIT SURYO NUGROHO

***Dewan Editor***

ANI WIDYANI SOETJIPTO (UNIVERSITAS INDONESIA)

ASRA VIRGIANITA (UNIVERSITAS INDONESIA)

EDY PRASETYONO (UNIVERSITAS INDONESIA)

EVI FITRIANI (UNIVERSITAS INDONESIA)

**Alamat Redaksi**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Gedung Nusantara 2 Lantai 2 Kampus FISIP UI Depok 16424, Indonesia

Tel/Fax : +62 21 7873744

E-mail : [jurnalglobal@ymail.com](mailto:jurnalglobal@ymail.com)

*Dilarang menggandakan, menyalin, atau menerbitkan ulang artikel dan/atau bagian artikel dalam jurnal ini tanpa seizin redaksi.*

---

## *Editorial*

---

Global: Jurnal Politik Internasional edisi kali ini berisi enam tulisan yang sebagian besar terkait dengan isu Keamanan Internasional. Edisi kali ini diawali dengan tulisan Muhammad A.S. Hikam mengenai Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. Hikam menekankan pada perlunya membangun pendidikan multikultural, terutama dalam sektor pendidikan non-formal di dalam komponen-komponen masyarakat, sebagai alat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam situasi dunia saat ini. Hikam menilai bahwa globalisasi membawa dampak yang tidak sepenuhnya positif terhadap Indonesia karena adanya faktor keragaman. Dampak negatif tersebut mampu merusak sendi-sendi kehidupan di Indonesia yang masuk melalui beragam cara, termasuk penetrasi langsung terhadap toleransi akan keberagaman. Pendidikan multikultural bisa digunakan sebagai saranan untuk menangkal masuknya penetrasi yang sifatnya merusak tersebut.

Tulisan kedua, Intelijen dan Diplomasi Internasional, menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara intelijen dan diplomasi. Tangguh Chairil, dosen di Universitas Bina Nusantara, secara detil menjelaskan bagaimana hubungan dekat antara intelijen dengan diplomasi mulai terpecah karena adanya spesialisasi fungsi pada periode Perang Dunia Kedua di beberapa negara utama, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Meski terpecah, intelijen dan diplomasi masih tetap berjalan seiring dalam tugas melindungi dan memastikan pencapaian kepentingan nasional.

Selanjutnya, Ristian Atriandi Supriyanto menulis mengenai dilema pengembangan program pertahanan misil balistik Amerika Serikat dalam *The Dagger and the Shield: The Ballistic Missile Defence and Sino-US Strategic Relationship*. Tulisan ini menjelaskan bagaimana upaya Amerika Serikat mengembangkan pertahanan misil balistik sebagai sarana yang ampuh untuk menangkal pengembangan nuklir negara-negara pengganggu seperti Korea Utara ternyata memunculkan ancaman bagi negara-negara lain seperti Cina. Pengembangan tersebut memicu Cina mengembangkan

persenjataan nuklirnya yang pada gilirannya berpotensi memunculkan pertarungan persenjataan. Untuk bisa membuat program pengembangan pertahanan misil balistik berkontribusi positif bagi stabilitas di kawasan Asia Pasifik, dialog yang konstruktif antara Amerika Serikat dan Cina menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Tulisan yang disajikan oleh Aisha Rasyidila Kusumasomantri didasari oleh gagasan strategi *Hedging* yang dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok. Tulisan yang berjudul “Strategi *Hedging* Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan” salah satunya membahas skenario pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara *middle power* di kawasan Asia dalam menghadapi kebangkitan kekuatan ekonomi, politik dan militer Cina. Tulisan ini kemudian disimpulkan dengan mengemukakan pendapat bahwa Indonesia melakukan *hedging* dengan strategi kebijakan bernuansa pragmatisme ekonomi, *indirect balancing*, *dominance denial* serta usaha untuk mengikat Cina sebagai salah satu mitra strategis Indonesia pada tahun 2005.

Tulisan kelima oleh Dira Tiarasari Febrian membawa gagasan pada pembangunan nasionalisme sumber daya manusia dalam *A Nationalis Human Resource as a Vital Asset for Indonesia's Development*. Nasionalisme merupakan unsur *non-tangible* yang menjadi kunci bagi kemajuan suatu negara selain pendidikan dan keterampilan. India dan Cina menjadi dua contoh negara yang mampu dengan baik menanamkan nasionalisme selain memberikan dukungan pendidikan dan keterampilan bagi sumber daya manusianya. Mereka bisa menjadi negara besar dengan adanya dukungan hal-hal tersebut. Indonesia bisa mengikuti pola yang mereka kembangkan untuk menjadi negara besar.

Tulisan terakhir dari Ziyad Falahi menyoroiti bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan justru terjebak dalam Kapitalisme Konsumerisme. Dalam Prospek Diplomasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Refleksi Teoritis Kajian Kapitalisme Konsumen di Era Susilo Bambang Yudhoyono, Falahi mendeskripsikan adaptasi Kapitalisme dengan melibatkan faktor-faktor non-produksi. Kapitalisme menemukan jalan baru dengan menggunakan pola konsumsi sebagai alat untuk mengukuhkan superioritas para kapitalis. Negara-negara Selatan juga terjebak dalam kondisi serupa dengan lahirnya kelompok kapitalis baru di

negara-negara Selatan yang mampu mendistribusikan produknya di negara-negara Selatan yang lain. Indonesia tidak mampu keluar dari jebakan Kapitalisme baru tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia justru mengukuhkan posisi Indonesia dalam kelompok yang paling dieksploitasi.

Tulisan-tulisan tersebut, dengan beragam tema, memberikan tambahan pengetahuan mengenai strategi negara untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menjadi kepentingan untuk bertahan hidup, berkembang menjadi negara besar, dan berkontribusi bagi stabilitas kawasan.

Selamat membaca!!

Depok, 30 Mei 2015

---

*Daftar Isi*

---

<b>Editorial</b>	iii-v
<b>Daftar Isi</b>	vi
<b>Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia.....</b>	<b>1- 17</b>
<i>Muhammad A.S. Hikam</i>	
<b>Intelijen dan Diplomasi Internasional.....</b>	<b>18 - 32</b>
<i>Tangguh Chairil</i>	
<b>The Dagger and the Shield: The Ballistic Missile Defence and Sino-US Strategic Relationship.....</b>	<b>33 - 48</b>
<i>Ristian Atriandi Supriyanto</i>	
<b>Strategi <i>Hedging</i> Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan.....</b>	<b>49 - 82</b>
<i>Aisha R. Kusumasomantri</i>	
<b>A Nationalis Human Resource as a Vital Asset for Indonesia's Development.....</b>	<b>83 - 97</b>
<i>Dira Tiarasari Fabrian</i>	
<b>Prospek Diplomasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Refleksi Teoritis Kajian Kapitalisme Konsumen di Era Susilo Bambang Yudhoyono.....</b>	<b>98 - 111</b>
<i>Ziyad Falahi</i>	

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM RANGKA MEMPERKUAT  
KEWASPADAAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME  
DI INDONESIA**

**Muhammad A.S. Hikam**  
**President University**  
**Email: mashikam@gmail.com**

***Abstrak***

*Multicultural education is a set of strategies to strengthen national integration aimed at facing possible threat to national security. Multiculturalism reflects Indonesia's socio-political realities due to the existing ethnic and cultural background of the nation. The diversity is both a priceless wealth and, at the same time, a potential threat factor that could endanger Indonesia's national security. Therefore, the government needs a breakthrough by implementing and strengthening its national vigilance among Indonesian people through multicultural education. The latter would widen and deepen the people's understanding of diversities that exist in society as well as enforce a sense of belongingness and solidarity. The implementation of multicultural education must be a join effort of government and the civil society in the forms of formal, informal, and non formal curricula.*

***Kata kunci***

*Pendidikan Multikultural, Kewaspadaan Nasional, dan Masyarakat Sipil*

**Pendahuluan**

Dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia selama satu dasawarsa terakhir menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat fundamental yang memerlukan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Berlangsungnya reformasi dalam tata kehidupan bermasyarakat menuntut berbagai penataan ulang dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (ipoleksosbuhankam) sehingga sesuai dengan filsafat dan cita-cita moral bangsa serta ideologi nasional Pancasila dan UUD 1945. Pada kenyataannya, upaya pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*).

Pada saat yang sama, usaha untuk merubah bentuk negara kebangsaan menjadi negara berdasarkan agama masih terus berlangsung, bahkan dilakukan dengan dengan penggunaan kekerasan. Pengaruh krisis ekonomi pada akhir masa Orde Baru ditambah dengan dinamika lingkungan global serta pengaruh sistem ekonomi neo-liberal menjadikan Indonesia belum mandiri dalam ekonomi dan belum mampu menyejahterakan rakyat di lapis bawah. Oleh sebab itu, penguatan kewaspadaan nasional (padnas) merupakan *sine qua non* apabila bangsa dan negara Indonesia ingin tetap terjaga keberadaan dan keberlangsungannya serta mampu menjadikan dirinya sebagai negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dalam konteks ini, penguatan ikatan ideologi Pancasila dan kebangsaan sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mutlak diperlukan. Salah satu strategi penguatan ini adalah integrasi nasional elemen masyarakat sipil di Indonesia (MSI) melalui pendidikan multikultural. Penguatan pendidikan multikultural diyakini efektif dan memiliki jangkauan jauh ke depan, khususnya untuk memperkuat ikatan kebangsaan yang, pada gilirannya, memperkuat ketahanan nasional (tannas) kita.

## **Hakekat, Tujuan, Strategi, dan Hambatan Pendidikan Multikultural**

### ***Hakekat dan Tujuan Pendidikan Multikultural***

Penyelenggara dan warga negara perlu menyadari bahwa multikulturalisme tidak sekedar wacana melainkan konsep yang keberadaannya dibutuhkan dan harus dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Multikulturalisme bukan ideologi yang berdiri sendiri dan terpisah dari konsep-konsep kebangsaan lainnya, namun hadir dan berkembang untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat (Amalia, 2013). Tentunya, konsep multikulturalisme dapat dituangkan ke dalam pendidikan karena berinteraksi langsung dengan manusia sejak usia dini atau usia sekolah. Dengan ditanamkannya pemahaman konsep multikulturalisme melalui pendidikan di sekolah maka Indonesia akan mampu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghargai perbedaan dan kemajemukan.

Pendidikan multikultural merupakan sebuah wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi, dan hak asasi manusia (Tilaar, 2003). Menurut Crandal (2003), pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang dari aspek keragaman suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, secara lebih singkat, pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya yang



bertujuan untuk menanamkan sikap bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Realitas Indonesia sebagai negara yang majemuk dan plural jelas membutuhkan pendidikan berbasis budaya untuk menghindari konflik vertikal, terutama yang terkait dengan perbedaan suku dan ras. Konflik rawan terjadi manakala masyarakat Indonesia tidak mampu memahami keberagaman sehingga tidak dapat menghadapi dengan bijak perbedaan-perbedaan dalam lingkungan sosial. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kemajuan pun dapat menjadi bumerang apabila pemerintah tidak segera memberikan perhatian yang lebih melalui pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural juga dapat dipersepsikan sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa yang kini dihadapkan pada beragam jenis tantangan dalam era globalisasi (Tilaar, 2003). Tujuan pendidikan multikultural adalah menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung oleh masyarakat sejak usia dini di sekolah (Baidhawiy, 2005). Menurut Suprpto (2009), pendidikan multikultural juga bertujuan mengajak masyarakat untuk bisa menerima perbedaan yang ada sebagai proses yang alamiah. Dengan demikian, akan mudah bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran akan kesetaraan terhadap kemajemukan kebangsaan, suku, ras, bahasa, dan budaya dalam tatanan kehidupan yang seimbang.

### ***Strategi Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Integrasi Nasional***

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan agama sehingga dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Sejak jaman dahulu kala, rakyat Indonesia telah terbiasa hidup dalam masyarakat multikultur dan plural secara harmonis. Namun, realitas multikultural tersebut meniscakan adanya kesiapan dan kemampuan untuk melakukan rekonstruksi dan pemaknaan ulang terhadap kebudayaan nasional Indonesia sehingga ia dapat terus menerus berperan sebagai kekuatan pengintegrasikan (*integrative force*) yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya demi memperkuat kembali integrasi nasional.

Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia di satu sisi merupakan kekayaan yang tak ternilai, namun, di sisi lain, menjadikan Indonesia rawan konflik, terutama di era pasca Reformasi. Kemajemukan, selain berpotensi positif memperkaya khazanah kebudayaan dan peradaban, menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah terbukti di beberapa wilayah

Indonesia yang ditandai dengan terjadinya konflik horizontal seperti di Sampit (antara Suku Madura dan Dayak), Poso (antara Kristiani dan Muslim), Aceh (antara GAM dan RI), ataupun perkelahian yang kerap terjadi antar-kampung di beberapa wilayah di pulau Jawa dan perkelahian pelajar antar-sekolah (Arifudin, 2007). Kasus terkini, dan tentunya bukan yang terakhir, adalah konflik antara suku Moni dengan suku Dani, di Kabupaten Mimika, Papua yang memakan puluhan korban jiwa dan menyebabkan ratusan orang mengungsi pada awal Januari 2014 (Kompas, 2014). Belum lagi kasus-kasus kekerasan berdalih paham keagamaan seperti pembunuhan, perusakan properti, dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah dan Syiah di beberapa daerah yang telah menjadi perhatian internasional. Sebagai contoh, kasus ratusan warga Suni yang menyerang warga Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur pada Agustus 2013 yang memperlihatkan begitu mudahnya masyarakat Indonesia terbawa emosi karena hanya perbedaan (Tempo, 2013). Selain itu, sampai saat ini pemerintah juga dianggap belum mampu menahan kemarahan ormas-ormas, khususnya Front Pembela Islam (FPI) kepada Ahmadiyah yang jumlah konfliknya mencapai lebih dari 300 kali sejak tahun 2008-2012 (Vivanews, 2012).

Karena itu diperlukan terobosan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dengan menggiatkan pendidikan multikultural. Salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah "penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah tengah masyarakat plural" (Arifuddin, 2007:1). Pendidikan multikultural diarahkan untuk membangun sikap peduli dan mau mengerti atau memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap pihak lain yang berbeda. Paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Pendidikan multikultural memuat tema-tema terkait dengan "toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan" (Arifuddin, 2007; Tilaar, 2002: 15).

MSI, sebagai kekuatan bangsa, sudah seharusnya mendapatkan pendidikan multikultural karena mereka memiliki posisi strategis yang dapat mempengaruhi secara langsung dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan merupakanimbangan sekaligus mitra bagi pemerintah (Hikam, 1999a, 1999b, 2001). Pengabaian terhadap MSI akan membuka peluang bagi kekuatan yang ingin

menjadikan mereka sebagai wahana dan bahkan sumber konflik horizontal sekaligus sasaran infiltrasi dan pengaruh dari ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa komponen penting dalam MSI yang terutama sangat perlu mendapatkan pendidikan multikultural antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas agama, komunitas-komunitas masyarakat adat nusantara, media, kelompok profesional, cendekiawan, kelompok tani dan pekerja, serta kalangan pengusaha. Mereka perlu mendapatkan pendidikan multikultural karena merupakan pihak yang kurang terinformasikan mengenai kebhinekaan Indonesia yang terbiasa didapat dari pendidikan formal.

Penanaman prinsip multikultural non-pendidikan formal sebenarnya sudah dikembangkan oleh beberapa pihak. Inisiatif-inisiatif ini muncul didasari oleh kondisi riil bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagian tokoh MSI saat ini semakin menyadari mengenai pentingnya integrasi nasional yang telah lama mengajarkan tentang multikulturalisme, misalnya mengembangkan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip multikulturalisme di pesantren-pesantren *Salaf*. Pendidikan multikultural inilah yang akan mengantarkan dan membangun manusia Indonesia mempunyai jiwa nasionalisme dan akhirnya dapat mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Apabila diwujudkan oleh pendidikan bercorak keagamaan, pendidikan multikultural diyakini dapat mengantarkan peserta didik untuk berpaham moderat dan inklusif (Marzuki, Miftahuddin, dan Murdiono, 2011).

Pendidikan multikultural berbasis masyarakat sipil merupakan pendidikan yang dirancang, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada (Furqaan dan Fatonah, 2012). Dengan kata lain, pendidikan multikulturalisme berbasis masyarakat sipil akan menjadi gerakan penyadaran nasional dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Upaya adaptasi perilaku tanpa ditopang kemampuan kognitif yang cukup dalam memahami konsep multikulturalisme tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan, baik pada tataran individu maupun kelompok. Menurut Sihombing, masyarakat tepat untuk dijadikan sasaran subjek pendidikan multikulturalisme karena setiap warga memiliki peran dan tanggung jawab yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh besar pada tatanan kehidupan sosial Indonesia (Furqaan dan Fatonah, 2012).

Pendidikan multikulturalisme harus dilandasi dengan nilai kebhinekaan sebagai salah satu pilar negara Indonesia. Kebhinekaan merupakan cermin kehidupan

masyarakat Indonesia yang majemuk dan diyakini sebagai modal bangsa untuk terus bertahan dalam perubahan lingkungan yang semakin cepat. Pendidikan multikultural yang berlandaskan kebhinnekaan apabila diterapkan dalam kehidupan sosial-budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui perbedaan-perbedaan yang ada (Anggraini, 2014). Dengan demikian, setiap warga sudah seharusnya menjadi subyek pendidikan multikultural sejak dini dan perkembangannya harus diperhatikan oleh pemerintah.

### ***Hambatan Implementasi Pendidikan Multikultural di Lingkungan Masyarakat***

Harus diakui bahwa kelompok-kelompok adat belum mendapat perhatian secara proporsional untuk diberikan pendidikan multikultural dalam beberapa dasawarsa terakhir. Padahal, kelompok ini merupakan salah satu kunci utama dalam mengendalikan suku-suku di Indonesia yang belum mendapat akses terhadap pendidikan formal. Misalnya dalam kasus di Timika, Papua dimana dua kelompok warga Kampung Liwung Mekar (sebelumnya disebut Tuni Kama), Kwamki Lama terlibat aksi saling serang dengan panah menyusul kematian Lenius Kogoya (Kompas, 20 November 2010). Perang suku tersebut sangat rawan terjadi bahkan di antara masyarakat adat yang mempunyai cukup banyak persamaan sebagai satu induk ras Melanesia (Papua). Kasus lain yang bisa dijadikan contoh mendesaknya pendidikan multikultural untuk MSI adalah peristiwa bentrokan dua kubu sebelum persidangan kasus *Blowfish* di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Meskipun latar belakang konflik ini adalah faktor ekonomi (perebutan lahan parkir), tetapi latar belakang kesukuan dan kedaerahan pun sangat menonjol, yaitu perkelahian antara suku Ambon dan Flores yang ada di Jakarta (Kompas, 29 September 2010).

Dua kasus di atas merupakan contoh-contoh kasus konflik yang telah cukup lama terjadi dan masih sering dijumpai hingga saat ini di beberapa wilayah Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Kepolisian Negara RI. Menurut Kadiv. Humas Mabes Polri, Irjen (Pol.) Ronnie F. Sompie, sejak tahun 2010-2014 telah terjadi ratusan konflik komunal yang jumlahnya cenderung meningkat. Dalam kurun waktu setahun pada 2010, misalnya, telah terjadi 51 konflik, sementara pada 2011 terjadi 109 konflik dan meningkat menjadi hingga 136 konflik pada 2012, sedangkan pada 2013 terdapat 164 konflik (Tribunnews, 2015). Meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah konflik (65 konflik) namun hal ini tidak menandakan bahwa Indonesia di tahun 2015

lepas dari rangkaian konflik-konflik sosial. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Jendral (Pol) Badrodin Haiti baru-baru ini di hadapan Komisi III DPR yang mengatakan pada tahun 2015 Indonesia diprediksi akan tetap menghadapi konflik-konflik sosial karena faktor-faktor ekonomi (Sinar Harapan, 2015).

Munculnya rangkaian konflik akan mempermudah masuknya ancaman besar lainnya, seperti ancaman radikalisme yang pada umumnya berkembang di daerah konflik. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman, mengatakan bahwa berkembangnya gerakan radikalisme di daerah konflik turut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengangguran, harta benda yang dikuasai, dan konflik komunal, termasuk masih adanya reaksi balas dendam dalam lingkungan masyarakat (JPNN, 2014). Sampai saat ini, beberapa daerah rawan konflik yang diprediksi akan menumbuhkan jaringan organisasi radikal, baik lama ataupun baru adalah Poso, Ambon, Aceh, dan Papua (JPNN, 2014). Keempat wilayah tersebut adalah wilayah lama yang sejak era reformasi sampai sekarang masih rawan konflik karena penanganan Pemerintah dirasakan masih belum optimal.

Dari contoh kasus di atas dapat diasumsikan pentingnya pemahaman tentang kehidupan bersama dalam keberagaman dalam masyarakat sipil. Sayangnya, usaha pemerintah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai multikulturalisme dalam MSI memang belum dilakukan secara terfokus dan terpadu. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis dan politis, MSI tidak berada di bawah satu departemen yang menangani semua dalam satu payung. Kelompok-kelompok agama, tanggung jawab tersebut berada di tangan Kementerian Agama sementara kelompok-kelompok masyarakat adat berada di tangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan untuk kelompok-kelompok lain, misalnya kaum miskin kota, berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Idealnya, meskipun berada di bawah tanggung jawab berbagai Kementerian berbeda, penanaman prinsip-prinsip multikultural melalui program pendidikan khusus untuk MSI ini sangat penting untuk segera dilakukan Pemerintah sehingga integrasi antara MSI dan pemerintah Indonesia semakin terbentuk dan diperkuat. Ketika pemahaman multikulturalisme tidak segera ditanamkan pada setiap Kementerian maka yang akan terjadi adalah strategi yang berjalan sendiri tanpa mencapai satu tujuan.

## **Kondisi dan Aspek Penguatan Kewaspadaan Nasional**

### ***Kondisi Kewaspadaan Nasional Saat Ini***

Pemahaman terhadap kondisi padnas pada saat ini harus berangkat dari konsepsi Wawasan Nusantara (wasantara) melalui tilikan terhadap *astagatra* (delapan gatra) yang ada di dalamnya. *Astagatra* tersusun dari gatra-gatra statis (*trigatra*), yang meliputi geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam (SKA) yang dimiliki Indonesia, dan gatra-gatra dinamis (*pancagatra*) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan (Pandoyo, 1994). Dengan pemahaman yang komprehensif, integral, dan integratif melalui *astagatra* maka akan dapat diketahui secara obyektif kondisi padnas kita saat ini, berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya.

Memasukkan konsep wasantra sebagai payung kewaspadaan nasional saat ini adalah hal yang penting mengingat pemerintah dan warga negara harus memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Wasantra sendiri memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam (Usman dalam Duhita, 2012). Ketika para penyelenggara negara dan warga negara masih belum memahami konsep wasantra maka dapat dipastikan sebenarnya bangsa Indonesia masih belum siap menghadapi segala bentuk tantangan di masa mendatang. Ketidaksiapan ini jelas berpengaruh buruk terhadap kondisi kewaspadaan nasional.

Kewaspadaan nasional memiliki arti kualitas kesiapan, kesiapsiagaan serta manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan pencegahan berbagai bentuk ancaman (Hikam, 2013). Menurut Lemhannas (2012), kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan kedudukan bangsa dan negara kesatuan Indonesia (Budigusdian, 2012). Ketika bangsa Indonesia memiliki rasa kewaspadaan nasional yang tinggi maka sebenarnya Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik terhadap segala bentuk perubahan lingkungan strategis yang memunculkan berbagai ancaman, tidak terkecuali gerakan radikalisme.

Era reformasi yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun tampaknya masih diwarnai banyak permasalahan serta ancaman, terutama dari dalam negeri sendiri. Tidak bisa dipungkiri kehidupan Indonesia saat ini sangat diwarnai oleh konflik sosial-komunal yang pada akhirnya memberikan ruang gerak yang lebih bebas pada kelompok-kelompok radikal. Meskipun kehidupan nasional Indonesia sudah mengalami kemajuan di berbagai aspek kehidupan, namun, dalam waktu yang bersamaan, terjadi berbagai macam kerawanan yang mengancam kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia (Wingarta, 2012). Kenyataan ini jelas memperlihatkan munculnya tanggapan bahwa kondisi negara sepertinya lebih aman dibandingkan pada era sebelumnya dan dengan demikian sudah selayaknya pemerintah meningkatkan rasa kewaspadaan nasionalnya.

Saat ini negara sedang mengalami krisis kewaspadaan nasional yang dapat dilihat dari semakin banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan semakin banyaknya kelompok-kelompok radikal yang tumbuh berkembang. Tampaknya Indonesia benar-benar menikmati euforia reformasi sampai-sampai melupakan kewaspadaannya terhadap ancaman dan tantangan yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasionalnya (Wingarta, 2012). Dengan demikian, kondisi kewaspadaan nasional Indonesia saat ini perlu diberikan prioritas dari pemerintah dan seluruh warga negaranya untuk memperkuat ketahanannya menghadapi rangkaian ancaman saat ini maupun di masa mendatang.

### ***Memperkuat Kewaspadaan Nasional Melalui Astagatra***

Aspek *astagatra* perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk memperkuat kewaspadaan nasional. Pada aspek *trigatra*, pemerintah yang tidak memperhatikan segala kekayaan dan potensi yang dimiliki dapat diasumsikan juga tidak memperhatikan tingkat kewaspadaannya. Indonesia memiliki posisi yang strategis dengan bentuk *archipelagic state* (negara kepulauan) yang terdiri atas 17.500 pulau-pulau besar dan kecil dan terletak di persilangan antara dua benua, Asia dan Australia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadikannya sebagai negara yang kaya akan sumber mineral, kekayaan laut, flora dan fauna yang sebagian masih belum teridentifikasi, khususnya biota laut. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa merupakan potensi kekuatan di

bidang SDM dan bidang perekonomian dunia, serta negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Posisi geopolitik yang strategis ini memerlukan kewaspadaan bangsa. Dilihat dari aspek geo-strategis global, NKRI merupakan target perebutan pengaruh khususnya negara-negara adikuasa yang pada pasca Perang Dingin harus melakukan berbagai penyesuaian karena hilangnya dua kekuatan adikuasa dan belum terjadinya suatu keseimbangan kekuatan baru (*new balance of power*) dalam konstelasi geopolitik dan geostrategi global (Suradinata, 2005). Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, serta sebagai pemimpin dunia Islam, akan selalu hadir dan berperan dalam setiap perubahan dalam percaturan antar-bangsa. Sementara itu, kemunculan kekuatan non-negara (*non-state forces*) dalam perpolitikan global juga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik karena implikasi-implikasinya bagi keamanan nasional. Fenomena perang asimetris (*asymmetric warfare*) dalam bentuk terorisme merupakan hal yang tak dapat diabaikan sebagai sebuah kenyataan dalam lingkungan strategis yang muncul dari kekuatan non-negara tersebut (Soesastro, 1993).

Sementara itu, pemerintah juga diharapkan tetap mengedepankan aspek *pancagatra* yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan (Pandoyo, 1994). NKRI yang diproklamasikan pada tahun 1945 sejatinya telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia semenjak masa penjajahan dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Barulah pada awal abad XX muncul kesadaran baru berupa kebangsaan yang mengkristal dari pengalaman keterjajahan dan ketertindasan serta kesadaran terhadap wilayah yang satu. Kesadaran tersebut membentuk kebangsaan Indonesia pada 28 Oktober 1928 dan kemudian menemukan momentumnya menjadi bangsa yang menegara pada 1945. Kristalisasi dari pengalaman sejarah, budaya, dan kehendak bangsa untuk menegara itu menjadi dasar bagi para pendiri bangsa untuk merumuskan suatu landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional berupa UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945.



## **Peningkatan Kewaspadaan Nasional Melalui Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Sipil**

### ***Masyarakat Sipil Sebagai Subyek***

Peningkatan kewaspadaan nasional adalah sebuah prasyarat penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional di semua negara, termasuk NKRI. Untuk tujuan tersebut, selain melalui jalur penguatan gatra-gatra politik dan ekonomi, peningkatan padnas melalui gatra ideologi dan sosial budaya adalah jalur yang harus ditempuh. Salah satu instrumen terpenting dalam hal ini adalah strategi integrasi nasional yang dilandasi oleh ikatan kebangsaan yang kokoh. Sebagaimana diketahui, integrasi nasional adalah proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional, sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam konteks ini, kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu rasa menjadi sebuah bangsa sebagaimana dikonsepsikan oleh Bung Karno, yaitu “entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, namun punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan di dalam wilayah yang jelas batas-batasnya.” (Lemhannas, 2011:6-7). Integrasi nasional dapat dikatakan telah terwujud manakala indikator-indikator berikut telah terpenuhi: 1) terpenuhinya rasa aman dan kondisi minimal keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai tujuan pembentukan negara dan pemerintahan; 2) berfungsinya institusi-institusi kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara terpadu; 3) terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan di antara berbagai golongan yang ada dalam masyarakat; dan 4) mampunya bangsa memanfaatkan peluang dan menanggulangi ancaman dari lingkungan yang serba berubah secara dinamis, demi menjamin kelangsungan hidup dan perjuangannya (Lemhannas, 2011:8).

Sementara itu, dalam rangka memperkuat integrasi nasional terdapat dua jalur yang bisa diambil: 1) integrasi internal komponen negara, dan; 2) integrasi antar-komponen negara. Integrasi nasional antar-komponen negara, dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 1) integrasi antara rakyat dan pemerintah; 2) integrasi antara rakyat dan wilayah, dan 3) integrasi antara pemerintah dan wilayah. Integrasi antara MSI dan Pemerintah adalah bagian integral dari integrasi rakyat dengan pemerintah tersebut. Di dalam integrasi ini tujuan utamanya adalah agar tercipta sinergi yang kuat dan saling

menguntungkan antara komponen dengan komponen pemerintah sehingga memperkuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 (Nasution, 1996).

Ada persyaratan tertentu agar integrasi nasional dapat terwujud, antara lain: 1) adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI; 2) adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan; 3) terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu perlu dicermati pengaruh lingkungan strategis baik pada konteks global, regional dan nasional yang akan berdampak kepada dinamika ipoleksosbudhankam, dan juga pengaruh distribusi dan mobilitas penduduk, alokasi sumber daya alam, dan wilayah (*trigatra*).

### ***Urgensi Penguatan Sinergi antara MSI dan Pemerintah***

Sinergi antara MSI dan pemerintah sangat penting dan harus segera dilaksanakan karena beberapa alasan. Pertama, pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa MSI merupakan kekuatan penting yang menjadi motor penggerak bagi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga apabila MSI lemah akan membawa dampak negatif bagi kemajuan bangsa. Sementara itu MSI turut memerlukan kemitraan dari pemerintah agar potensi-potensi disintegrasi di dalamnya dapat dikelola dengan baik dan ditransformasi menjadi energi yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sinergi yang baik dengan MSI akan menjadi sumber bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya karena ia akan dapat memanfaatkan jejaring yang luas baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Kedua, kecenderungan perkembangan global untuk mendukung orientasi kepada pembangunan berbasis kerakyatan (*people-oriented development*) dan pendekatan dari bawah (*bottom-up approaches*) akan dapat diwujudkan lebih mudah jika integrasi MSI dan pemerintah semakin kokoh. Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan paradigma keamanan menyeluruh (*comprehensive security paradigm*) yang kini dianut akan lebih efektif jika didukung oleh sinergi dan integrasi kuat antara MSI dan pemerintah.

Dalam konteks penguatan integrasi antara MSI dan pemerintah tersebut, hal yang sangat urgen dilakukan adalah penguatan ikatan kebangsaan dalam batang tubuh pihak yang pertama. Hal ini disebabkan karena heterogenitas MSI yang memungkinkan terjadinya konflik-konflik kepentingan dan melunturnya ikatan

kebangsaan. Demikian pula organisasi MSI yang puluhan ribu banyaknya merupakan pintu-pintu masuk bagi pengaruh yang dapat dipergunakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan luar untuk menciptakan TAHG (tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan) bagi Indonesia. LSM, media massa, ormas-ormas besar, termasuk ormas keagamaan, kelompok profesional, cendekiawan, dan mahasiswa, serta kelompok buruh adalah sasaran bagi penetrasi, infiltrasi, dan intervensi baik secara ideologis maupun non-ideologis yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sinilah relevansi pendidikan multikultural dalam memperkokoh integrasi nasional dan meningkatkan padnas dalam rangka ketahanan nasional Indonesia.

Relevansi pendidikan multikultural memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan MSI mengingat warga negara adalah subjek dari kemajemukan yang ada dalam Indonesia. Pendidikan multikultural memerlukan ruang dialog dengan berbagai kalangan lintas budaya, sosial politik, ekonomi, dan agama sehingga dapat meminimalkan penyempitan cara berpikir yang tidak selaras dengan kehidupan yang majemuk (Widiuseno, 2012). Wacana pendidikan multikultural dimaksudkan untuk merespon dampak perkembangan globalisasi dan fenomena konflik etnis, sosial, dan budaya yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, pendidikan multikultural memang sudah layak ditempatkan di tengah-tengah kehidupan MSI.

Ditanamkannya pendidikan multikultural di tengah-tengah masyarakat akan memberikan solusi yang tepat dalam menangani ancaman keberagaman. Pendidikan multikultural akan mempengaruhi tingkat laku dan cara berpikir MSI dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sebagai ciri khas negara yang berbhinneka tunggal ika. Cara berpikir yang tidak didasari oleh konsep multikulturalisme tidak akan mampu menerima perbedaan yang ada dan pada akhirnya dengan mudah terbawa arus konflik yang disebabkan oleh kondisi kehidupan Indonesia yang majemuk.

### **Pelaksanaan Strategi Nasional Pendidikan Multikultural Kepada MSI**

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memikirkan strategi nasional terkait pendidikan multikultural kepada MSI agar dapat segera diselenggarakan. Strategi yang dibutuhkan tentunya harus dapat diimplementasikan pada lingkungan sosial yang majemuk dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Implementasi strategi nasional terkait pendidikan multikultural perlu dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua perwakilan masyarakat, baik itu dari kalangan menengah, bawah,

maupun para penyelenggara pemerintah. Oleh karena itu, berikut adalah strategi-strategi yang sepertinya mampu memperkuat pendidikan multikultural sebagai kekuatan melawan potensi-potensi ancaman dan tantangan negara Indonesia;

- a) Penyelenggaraan pendidikan multikultural untuk MSI, terutama pada jalur formal. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian penyuluhan dan pemahaman tentang multikulturalisme di Indonesia terhadap pimpinan/tokoh komunitas-komunitas MSI baik itu komunitas agama, masyarakat adat, atau ormas-ormas dengan menggunakan lembaga pendidikan formal secara berjenjang.
- b) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pendidikan multikultural, baik di lembaga formal, non formal maupun informal. Karena pengembangan pendidikan multikultural sangat mendesak untuk segera dilakukan secara simultan dan *multitracks*, maka jelas diperlukan suatu anggaran khusus yang cukup besar. Apalagi jika mengingat pendidikan multikultural bersifat *open-ended* dan berkelanjutan.
- c) Sosialisasi tentang nilai-nilai multikulturalisme kepada masyarakat luas melalui berbagai wahana misalnya media cetak dan elektronik. Penggunaan media massa untuk penyebaran nilai-nilai multikultural ini diharapkan dapat efektif karena media massa dapat menjangkau orang dalam jumlah banyak di seluruh Indonesia. Kreativitas para sinematografi kita perlu dimanfaatkan sehingga berbagai produk film nasional yang berkualitas dapat diberi muatan yg bernuansa pendidikan multikultural.
- d) Kementerian-kementerian yang terkait harus membuat berbagai program *in-house* tentang kebhinekaan Indonesia dan kesadaran multikultural kepada komponen-komponen MSI yang menjadi mitranya. Selanjutnya, kementerian-kementerian tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mengawal pada sisi substansi pendidikan multikultural tersebut.
- e) Pemerintah terus menjalin dan memperkuat kerja sama dan sinergi dengan komponen masyarakat sipil yang strategis dan memiliki perhatian terhadap pendidikan multikultural bagi kelompok agama, masyarakat adat, kaum miskin, dan kaum marginal lainnya. Dengan strategi ini akan dapat dipetakan lebih baik dan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mengenai potensi MSI.

## Penutup

Tulisan ini menyumbangkan pemikiran untuk kebijakan nasional dalam rangka peningkatan tannas melalui keterkaitan antara wasantara dan padnas. Dalam hal ini, elemen wasantara diambil dari gatra sosial budaya, yaitu: pendidikan multikultural, sedangkan elemen padnas adalah integrasi nasional, khususnya integrasi antara MSI dengan pemerintah. Hal ini penting mengingat masih maraknya konflik-konflik horizontal yang disebabkan kurangnya toleransi terhadap keragaman dan erosi ikatan kebangsaan yang merupakan landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan multikultural sangat mendesak untuk dikembangkan dalam MSI karena pentingnya peranan mereka dalam lingkungan strategis saat ini dan masa depan sebagai penyeimbang pemerintah dan kekuatan demokrasi. Jika MSI tidak diikat oleh rasa kebangsaan, niscaya kewaspadaan nasional juga akan mengalami pelemahan yang sangat signifikan.

Berbagai strategi untuk pendidikan multikultural MSI perlu terus dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun MSI berikut para pemimpin dan aktivisnya. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih untuk pendidikan multikultural MSI melalui jalur formal, non formal, dan informal. Anggaran negara untuk pendidikan multikultural harus dijamin dan bersifat berkelanjutan. Hal ini disebabkan jumlah rakyat Indonesia yang tidak mempunyai akses terhadap pendidikan formal dan masih minimnya pemahaman yang baik mengenai masalah ini. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, diharapkan akan mempermudah integrasi antara masyarakat dan pemerintah yang merupakan salah satu faktor terpenting di dalam padnas. Dengan semakin kuatnya padnas maka ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara RI dalam menghadapi TAHG dan mencapai tujuan nasional, akan semakin meningkat.

## Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_. *Bekas Daerah Konflik Rawan Berkembang Terorisme*. Dalam harian "JPNN", 19 Desember 2014 <http://www.jpnn.com/read/2014/12/19/276437/Bekas-Daerah-Konflik-Rawan-Berkembang-Terorisme>
- \_\_\_\_\_. *Indonesia as the New India*. Dalam majalah "Newsweek" 11 Oktober 2008.
- \_\_\_\_\_. *Inilah Kronologi Bentrok di PN Jaksel*. Dalam harian "Kompas" 29 September 2010 dapat diakses di <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/29/15500010/Inilah.Kronologi.Bentrok.di.PN.Jaksel>.

- \_\_\_\_\_. *Lagi, Ratusan Warga Papua Perang Panah*. Dalam harian "Kompas" 20 November 2010.  
<http://regional.kompas.com/read/2010/11/20/19093973/Lagi.Ratusan.Warga.Papua.Perang.Panah>.
- \_\_\_\_\_. 2008. "Ketahanan Sosial Masyarakat, Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Nasional," 8 August.  
<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=769>
- \_\_\_\_\_. 2013. Konflik Reda, Kampung Syiah Tetap Dijaga Polisi.  
<http://www.tempo.co/read/news/2015/03/31/058654303/Konflik-Reda-Kampung-Syiah-Tetap-Dijaga-Polisi>.
- \_\_\_\_\_. 2012. Mengapa Selalu Ada Konflik Ahmadiyah.  
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/362674-mengapa-selalu-ada-konflik-ahmadiyah->
- \_\_\_\_\_. 2015. *Tahun Ini Aksi Separatis, Konflik, dan Premanisme Diprediksi Masih Terjadi*. Dalam harian Tribunnews.  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/02/aksi-separatis-konflik-dan-premanisme-diprediksi-masih-terjadi-di-2015>
- Amalia, Emma. 2012. *Hakikat Pendidikan Multikultural*. UI, Jakarta
- Anggraini, Fenty. 2014. Pentingnya Pendidikan Multikultural Berlandaskan Nilai Kebhinekaan Dalam Masyarakat Plural. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Arifudin, Iis. 2007. "Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah." *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan "Insania"*, Vol. 12 No. 2 Mei-Ags.
- Budigusdian, Sam. *Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Ketahanan Pangan Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Lemhannas, PPRA XLVIII/Pok.E, 2012
- Furqaan, Zhilal dan Fatonah, Khusnul. 2012 *Pendidikan Multikultural Berbasis Masyarakat: Sebagai Upaya Pengurangan Prasangka Di tengah Kemajemukan Masyarakat Indonesia*.
- H.A.R Tilaar. 2003. *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural, Indonesia*
- H.A.R. Tilaar. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Grasindo,
- Soesatro, Hadi. 1993. "Implikasi Situasi Keamanan dan Politik Pasca Perang Dingin Terhadap Perekonomian Pasifik." *Jurnal Analisis CSIS*, vol. 22 no. 4.
- Hanum, Farida. 2011. *Pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa*. Dalam "Dinamika Pendidikan" FIP UNY. 25 Maret.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hikam, Muhammad AS. 1999a. *Demokrasi dan Civil Society*, edisi 2. Jakarta: LP3ES.
- Hikam, Muhammad AS. 1999b. *Politik Kewarganegaraan: Landasan bagi Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Humas Unpar. 2007. "Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia."  
<http://www.unpar.ac.id/berita.php?cmd=view&id=06011815271951&PHPWEBMAILSESSID=8007f069f761ad883d0f46cb7e02b868>.
- Idris. Andi Muhammad. 2011. *Epistemologi Pendidikan Islam Sebagai Pengantar*.  
<http://www.andimuhammad.wordpress.com/2011/01/15/epistemologi-pendidikan-islam-sebagai-pengantar/>, diakses pada 14 Juni 2013.
- Marzuki dan Miftahuddin, M. Murdiono. 2011. *Tipologi Perubahan dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*. Yogyakarta: UNY.

- Muladi. *Beberapa Catatan Terkait Usul Amandemen Ke-lima UUD Negara RI Tahun 1945*. Makalah disampaikan dalam Dialog Demokrasi The Habibie Center, 20 April 2011.
- Nasution, A. S. (ed.). 1996. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya*. 1996. Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta.
- Pandoyo, S. Toto. 1994. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarjadi, Soegeng dan Iman Sugema (eds.). 2009. *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate.
- Suparno, Paul. "Pendidikan Multikultural." 2003. *Kompas*, 4 September. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546.htm>.
- Suprpto, 2009. Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural. *Jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan*. - Maret.
- Tilaar, H.A.R.. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R.. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Wahid, Abdurrahman (ed.). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Zakiyuddin Baidhawiy, 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* Jakarta: Erlangga.
- Zuhro, Siti. 2010. "Pemekaran Berkembang Liar." Dalam *Harian Republika*, 1 Februari, hal. 5.
- Lemhannas R.I., Pokja B.S. Padnas, TOR Essay Padnas PPRA XLVIII, Jakarta, 2012.